

REFORMASI BIROKRASI DI KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG

Deni Hari Sucipto

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: harisucipto@gmail.com

***ABSTRACT.** Development Agenda Agenda for bureaucratic reform is one thing that gets special attention for the government. The Special Ministry that discusses bureaucratic matters, namely the Ministry of Empowerment of the State Apparatus and Bureaucratic Reform (PERMENPAN-RB). In the framework of carrying out the mandate of bureaucratic reform, Buah Dua Subdistrict, Sumedang Regency, approved in the Strategic Plan, Buah Dua Subdistrict (2014-2018: 2), was agreed to provide direction and reference for all components of the sub-district government, community and business world in order to realize their ideals and the objectives of the sub-district government are in accordance with the vision and mission as well as the direction of development that directs the policies of the Sumedang district government. Targeting is taken using the Sampling Technique, where the object is the District Head and Stakeholders with an interest in public service bureaucratic reform in Buahdua District. Based on the results of the study found the implementation of bureaucratic reform in the Buahdua sub-district has not been implemented very well, in fact the budget support for infrastructure to improve public services is very low, there is still something related to service information, Assessment To appreciate the vision and mission of the Buahdua sub-district. The obstacle that symbolizes bureaucratic reform, namely the organizational culture in Buahdua Subdistrict is still not conducive due to the involvement of the authorities, there is no proper honor for sukwan / award recipients who are very helpful in the process of public service, and every standard and complete SOP unit for the type services in their fields. Strategies to overcome obstacles to the implementation of bureaucratic reform in the Upper Buahdua Subdistrict, namely the DPRD must support proper respect for high performing religious workers by allocating to the APBD, Must provide space to the community through musrenbang, aspirations, must use service media.*

***Keywords:** Reform, Buahdua, Sumedang Regency*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam pencapaian visi dan misi setiap instansi/lembaga pemerintahan yang berada dilapisan paling bawah khususnya kecamatan harus selaras dengan visi misi daerah dalam perwujudan visi nasional, hal ini juga dipertegas oleh peraturan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu indikator keberhasilan dalam merumuskan visi misi organisasi yaitu memperbaiki individu yang ada di dalam organisasi dengan pembaharuan struktur organisasi dengan hasil koreksi tupoksi setiap pegawai agar menjadi pedoman. Dalam rangka mengemban amanat reformasi birokrasi Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang, sebagaimana

disebutkan dalam Renstra Kecamatan Buah Dua (2014-2018:2), bermaksud memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintahan kecamatan sesuai dengan visi dan misi serta arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumedang.

Misi ke-1 Kabupaten Sumedang adalah meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi, maka Pemerintahan Kecamatan Buah Dua sesuai dengan misi tersebut, mengemban tugas mewujudkan tujuan dalam misi tersebut. Mencermati penjabaran di atas, reformasi birokrasi

yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati. Dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang, diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang No. 55 Tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di kecamatan buahdua belum dilaksanakan dengan sangat baik, faktanya dukungan anggaran untuk sarana prasarana peningkatan pelayanan publik sangat rendah, masih ada permasalahan terkait informasi layanan, Asesmen kompetensi belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk staf, secara keseluruhan masalah tersebut berdampak kepada pencapaian visi misi Kecamatan Buahdua.

Hambatan yang dihadapi dalam melaksakan reformasi birokrasi, yaitu budaya organisasi di kecamatan buahdua masih kurang kondusif ini diakibatkan karena camat bersikap otoriter, tidak adanya honor yang layak untuk tenaga sukwan/honorer yang begitu banyak membantu dalam proses pelayanan kepada publik, dan setiap unit layanan belum memiliki SOP yang baku serta rinci untuk jenis layanan di bidangnya. Strategi untuk menanggulangi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi di kecamatan buahdua diatas, yaitu DPRD harus mendorong untuk memberikan honor yang layak bagi tenaga sukwan yang berprestasi dengan mengalokasikan pada APBD, Harus memeberikan ruang berpartisipasi kepada masyarakat melalui musrenbang secara aspiratif, Harus menerapkan media komplain masyarakat sebagai evaluasi kinerja pelayanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Akadun 2007:37), adalah: "Administrasi merupakan sistem yang telah dipraktikkan dalam setiap upaya kerjasama manusia secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu dalam perkembangannya administrasi dapat dipandang dari dua sudut, yaitu sebagai ilmu (*science*) atau disiplin dan sebagai seni (*art*) atau *system*".

Adapun Makmur (2007:6), memberikan penjelasan tentang hakikat ilmu administrasi. Beliau mengatakan bahwa: "Ilmu administrasi merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keteraturan dari berbagai aksi dan reaksi yang dilakukan oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas administrasi dalam bentuk kerja sama menuju terwujudnya tujuan tertentu".

Birokrasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, secara historis berasal dari kelompok elit (*priyayi*) sehingga kurang memahami kehidupan dan partisipasi masyarakat di lapisan bawah, sebagaimana diungkapkan oleh Gaffar (1999:230), yang mengungkapkan bahwa: "Karena itu pada umumnya birokrasi menjadi kurang tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Birokrasi (*prangreh praja*) lebih dimaksudkan sebagai instrumen kekuasaan pemerintah, baik pemerintah kerajaan maupun pemerintahan kolonial". Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses perubahan, tentu saja strategi *top-down* sehingga diharapkan perubahan itu berlangsung dari atas ke bawah. Hal ini dapat dipahami sebab budaya *patron-client* dalam tubuh birokrasi masih sangat melekat sehingga dapat diharapkan dengan reformasi yang dilakukan secara

top-down maka pelaksanaannya menjadi semakin efektif.

Adapun elemen yang umum di dalam berbagai definisi reformasi birokrasi antara lain diungkapkan oleh Nasucha (2004: 43-44), bahwa: "Pertama, reformasi birokrasi merupakan rencana yang hati-hati untuk mengubah birokrasi publik. Kedua, reformasi birokrasi bersinonim dengan inovasi. Ketiga, efisiensi dan efektifitas dari pelayanan publik adalah hasil dari proses reformasi. Keempat, mendesaknya reformasi dijustifikasi sebagai kebutuhan untuk memecahkan ketidakpastian dan perubahan yang cepat dalam sebuah lingkungan organisasi".

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang didukung oleh penyelenggara negara yang profesional, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan sehingga tercapai pelayanan prima. Sedarmayanti (2013: 75-76), secara terperinci memaparkan apa yang menjadi tujuan reformasi birokrasi secara khusus, apa saja yang menjadi prinsip reformasi birokrasi dan apa yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, yang akan diuraikan sebagai berikut.

Tujuan reformasi birokrasi secara khusus adalah:

1. Birokrasi bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Birokrasi efisien, tidak boros/ hemat dalam penggunaan sumber daya.
3. Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggungjawab, dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
4. Birokrasi produktif, mampu mengeluarkan keluaran yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
5. Birokrasi sejahtera, digaji sesuai beban tugas, bobot dan tanggungjawab jabatan.

Adapun prinsip reformasi birokrasi, diantaranya:

1. Peningkatan kinerja ditunjang profesionalisme sumber daya manusia
2. Penghematan sumber daya organisasi: 5M + 1T (*Man, Money, Materia, Methode, Machine, Time*).
3. Bukan sekedar menaikkan gaji.
4. Remunerasi: bersifat nasional yang akan mengalami perbaikan secara menyeluruh.
5. Tunjangan kinerja diberikan kepada: yang berprestasi dan sebagai proyek percontohan harus ditentukan bebarapa unit kerja yang akan langsung melayani masyarakat.

Sasaran reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Terwujudnya birokrasi profesional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang proporsional, fleksibel, efektif, baik dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
3. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat, tidak berbelit dan mudah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif atau yang sering disebut metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sedangkan menurut Sugiyono (2013:1) metode kualitatif adalah:

Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik-teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa dalam sebuah studi kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif naturalistik. Pendekatan kualitatif dimana instrumen utamanya adalah peneliti sendiri selaku peneliti.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tersebut, maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistik*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti.

Penulis mengambil sejumlah sasaran tersebut di atas berdasarkan pertimbangan bahwa mereka terlibat secara langsung, berkompeten serta bertanggung jawab terhadap agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang. Adapun penjelasan dari masing-masing sasaran dan informan di atas yaitu:

1. Camat Kecamatan Buah yang mempunyai kendali, pengambil kebijakan internal, mengkoordinasikan, mensinergiskan sumber daya yang dimiliki pemerintahan kecamatan dalam menetapkan agenda reformasi dan tujuan reformasi birokrasi.
2. Sekretaris Camat Kecamatan Buah Dua membantu Camat dalam kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja kecamatan.
3. Sub Bagian Program dan Keuangan, membantu Sekcam dalam hal agenda kerja dan perencanaan anggaran rumah tangga kecamatan.

4. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian, membantu Sekcam dalam hal pertanggungjawaban sarana prasarana, inventarisasi dan pengaturan kepegawaian.
5. Sub Bagian Pelayanan Umum bertugas sebagai penyedia dan penyelenggara kegiatan pelayanan umum.
6. Kasi tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan tata pemerintahan.

Guna menunjang metode penelitian yang digunakan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang diuraikan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya sebagai pegangan yang berkaitan dengan tema penelitian.
2. Studi Lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan terhadap objek penelitian dari lokasi penelitian dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian dan menganalisa berbagai kondisi sebenarnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam observasi ini penulis menggunakan teknik observasi non-partisipatif, dimana penulis hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat atau berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan para subjek yang diamati.
 - b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.
 - c. Telaah Dokumen merupakan kegiatan

mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dan dibutuhkan dalam penelitian (Moleong, 2007:219). Dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Buah Dua.

Dalam penelitian ini, prosedur pengolahan data yang penulis lakukan adalah pengolahan data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2005: 95), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

1. Reduksi Data; diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan ditarik kesimpulan.
2. Penyajian Data; penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Pada masa ini, penyajian data harus meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi; menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, suatu

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makin seksama dengan peninjauan. Singkatnya, makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya melalui kegiatan triangulasi. Kesimpulan-kesimpulan ini diverifikasi selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang

Pengesahan Tupoksi Melalui Pembaruan Struktur Organisasi

Potret pelaksanaan reformasi birokrasi di kecamatan buah dua salah satunya adalah melalui evaluasi serta penilaian kerja yang ditindak lanjuti oleh pembaharuan struktur organisasi melalui rotasi pegawai di berbagai unit layanan agar kualitas layanan kedepan di kecamatan buahdua lebih baik bahwa dengan adanya evaluasi serta penilaian kinerja setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan kecamatan buahdua baik camat serta pemda kabupaten sumedang yang merujuk pada perubahan struktur organisasi serta koreksi tupoksi setiap pegawai. Hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan struktur organisasi di internal Kecamatan Buahdua.

Penambahan Kewenangan Penandatanganan

Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan dalam membuat surat pengantar SKCK yang harus ditandatangani dan diketahui oleh unsur pimpinan kecamatan buahdua faktanya camat memberikan kewenangan kepada kasi pelayanan umum untuk dapat diwakilkan kewenangannya. Hal ini merupakan salah satu upaya nyata dalam memberikan akses kemudahan layanan

kepada masyarakat. Namun, disisi lain harus ada semacam insentif bagi Kasi Pelayanan Umum untuk memberikan motivasi kerjanya.

Penyederhanaan Prosedur Kerja/ Persyaratan Kegiatan Pelayanan

Potret pelaksanaan reformasi birokrasi di kecamatan buah dua salah satunya adalah melalui alur pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang dituangkan dalam bagan/alur pelayanan untuk dipublikasikan kepada publik agar publik lebih memahami alur pelayanan yang akan ditempuhnya. Namun jika merujuk pada hasil observasi peneliti masih ada permasalahan terkait informasi layanan kepada publik melalui alur/bagan pelayanan.

Secara Keseluruhan potret reformasi birokrasi dapat dilihat dari aspek pelaksanaan SOP di kecamatan buahdua. Secara normatif setiap unit layanan kecamatan buahdua memiliki SOP, Namun jika merujuk pada hasil observasi peneliti masih ada permasalahan terkait informasi layanan kepada publik melalui alur/bagan pelayanan untuk mempermudah dalam melaksanakan pelayanan yang akan ditempuh oleh penerima manfaat.

Melengkapi Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pelayanan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di kecamatan buah dua salah satunya adalah melalui Dukungan anggaran untuk sarana prasarana yang menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik yang bersifat pemeliharaan sarana kantor maupun dalam bentuk pelatihan khusus kepada pegawai. Namun faktanya berdasarkan hasil observasi peneliti masih mengalami permasalahan di sektor sarana prasarana pelayanan.

Secara Keseluruhan dukungan anggaran untuk sarana prasarana peningkatan pelayanan publik masih belum

maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kerusakan dan tidak terpeliharanya alat penunjang kerja di kecamatan buah dua.

Jumlah SDM Sesuai Dengan Keahlian dan Pengalaman

Potret pelaksanaan reformasi birokrasi di kecamatan buah dua salah satunya adalah melalui penempatan pegawai yang didasarkan kepada penilaian kerja untuk memperoleh kompetensi yang pegawai yang di harapkan agar dapat tercapai tujuan organisasi di Kecamatan Buahdua.

Secara Keseluruhan rotasi jabatan yang hampir sering dilakukan setiap tahunnya oleh buapti sumedang masih belum efektif karena belum bisa memberikan waktu adaptasi kerja yang cukup bagi pegawai, rotasi jabatan masih belum didasarkan kepada penilaian kerja yang objektif karena faktanya Asesmen kompetensi belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk staf, untuk golongan IV dan III belum dilaksanakan, namun sudah hanya eselon II, III, IV dan III-A.

Porsi Pelatihan

Secara Keseluruhan proporsi pelatihan bagi pegawai kecamatan buahdua sudah banyak dilaksanakan baik yang diselenggarakan oleh pemma sumedang yang bersumber APBD maupun kecamatan buahdua. Namun, dari jenis pelatihan yang ada masih belum didasarkan kepada analisis kebutuhan pelatihan pegawai agar lebih efektif.

Evaluasi Kerja

Secara Keseluruhan evaluasi kerja yang diterapkan oleh kecamatan buahdua salah satunya adalah dengan menerapkan absen elektronik pegawai yang memiliki fungsi sebagai sensor Absensi Sidik Jari atau Smart Card dengan database system sehingga data kehadiran, keterlambatan bisa terekapitulasi dan ditampilkan sebagai laporan dalam sebuah report.

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Budaya Organisasi

Dalam hal budaya organisasi di kecamatan buahdua masih mengalami permasalahan, faktanya budaya organisasi di kecamatan buahdua masih kurang kondusif hal ini terlihat pada hasil observasi peneliti yang mengatakan bahwa pimpinan dalam hal ini camat masih bertindak otoriter.

Kerjasama antar Bidang/unit layanan

Kerjasama struktur kelembagaan di kecamatan buahdua cukup baik karena sejauh ini dalam penyelesaian tugas dan pekerjaannya setiap bidang selalu melakukan koordinasi yang intensif, fakta yang terjadi selesainya dokumen RKA Kecamatan buahdua tidak terlepas koordinasi yang baik antara kasubag dengan sekcam.

Adanya struktur kelembagaan yang masih besar

Kinerja dikecamatan buahdua sangat terbantu dengan tenaga sukwan yang ada saat ini, namun akan lebih baik jika tenaga sukwan diberikan honor yang layak untuk lebih meningkatkan motivasi kerja serta memiliki rasa tanggungjawab.

Penerapan Standar oprasional prosedur

Pelayanan di kecamatan buahdua dijalankan dengan standar oprasional prosedur yang ada saat ini, namun ada beberapa jenis layanan yang masih belum dibuatkan SOP nya seperti kemudahan untuk penerima manfaat dalam mengakses layanan KTP melalui bagan/alur pelayanan yang secara ril memberikan informasi proses layanan yang akan ditempuh.

Pembagian kerja

Dalam hal pembagian kerja di camatan buahdua sudah sesuai dengan kemampuan dimasing masing bidang, hal

tersebut didukung dengan adanya uji kompetensi pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon penerima jabatan yang akan di amanatkannya.

3. Strategi Melaksanakan Reformasi

Evaluasi struktur organisasi

Evaluasi struktur organisasi di kecamatan buahdua sejauh ini masih dilakukan melalui absen elektronik dengan melihat report laporan kehadiran, dan pelibatan lembaga lembaga masyarakat di lingkungan kecamatan buahdua meskipun belum dilaksanakan secara rutin oleh kecamatan buahdua.

Rasionalisasi pegawai

Di pemerintah kecamatan buahdua belum melaksanakan rasionalisasi pegawai karena belum ada regulasi yang menginstruksikan secara khusus mengenai pemangkasan pegawai. Disisi lain dengan jumlah SDM saat ini dirasa sangat efektif meskipun hak yang didapatkan belum layak.

Media Pengaduan layanan

Informan menganggap bahwa media pengaduan masyarakat sangat begitu penting utnuk mengevaluasi internal organisasi, namun fakta yang terjadi kotak pengaduan di kecamatan buahdua untuk menampung keluhan keluhan masyarakat masih belum tersedia.

Perencanaan penganggaran berbasis partisipasi publik

Keseluruhan upaya nyata yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memeberikan ruang berpartisipasi kepada masyarakat yaitu dengan adanya musrenbang yang nantinya menghasilkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian peneliti mengenai Reformasi Birokrasi di Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam hal pencapaian visi misi secara *de facto* di lapangan masih ada salah satu misi yang belum tercapai sepenuhnya seperti "*peningkatan ekonomi yang berdaya saing dan berkualitas*" hal ini kurang di dukung oleh pemerintah daerah kabupaten sumedang faktanya tidak ada program yang bersifat indikatif di bidang ekonomi tahun 2016 (RKA-2016). Hal ini juga, merupakan dukungan sebagai bentuk penataan kelembagaan yang berimplikasi kepada pelayanan publik di kecamatan buahdua serta sebagai proses nyata reformasi birokrasi yang harus didukung oleh pemerintah daerah kabupaten sumedang.
2. Masih ada permasalahan terkait informasi layanan kepada publik melalui alur/bagan pelayanan untuk mempermudah dalam melaksanakan pelayanan yang akan ditempuh oleh penerima manfaat.
3. Dukungan anggaran untuk sarana prasarana peningkatan pelayanan publik masih belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kerusakan dan tidak terpeliharanya alat penunjang kerja di kecamatan buah dua.
4. Rotasi jabatan masih belum didasarkan kepada penilaian kerja yang objektif karena faktanya Asesmen kompetensi belum dilaksanakan secara menyeluruh untuk staf, untuk golongan IV dan III belum dilaksanakan, namun sudah hanya eselon II, III, IV dan III-A.
5. Secara Keseluruhan proporsi pelatihan bagi pegawai kecamatan buahdua sudah banyak dilaksanakan baik yang diselenggarakan oleh pemda sumedang yang bersumber

APBD maupun kecamatan buahdua. Namun, dari jenis pelatihan yang ada masih belum didasarkan kepada analisis kebutuhan pelatihan pegawai agar lebih efektif.

6. Secara Keseluruhan evaluasi kerja yang diterapkan oleh kecamatan buahdua salah satunya adalah dengan menerapkan absen elektronik pegawai yang memiliki fungsi sebagai sensor Absensi Sidik Jari atau Smart Card dengan database system sehingga data kehadiran, keterlambatan bisa terekapitulasi dan ditampilkan sebagai laporan dalam sebuah report.

Beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

1. Harus adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah sumedang untuk program dibidang ekonomi dalam mewujudkan visi misi Kecamatan Buahdua.
2. Harus adanya honor yang layak bagi tenaga sukwan/honorer dikecamatan buahdua untuk meningkatkan motivasi kerjanya
3. Harus adanya Asesmen kompetensi yang dilaksanakan secara menyeluruh untuk staf, untuk golongan IV dan III.
4. Adanya pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.
5. Harus ada bagan/alur pelayanan terutama dalam pembuatan KTP yang diinformasikan melalui bagan serta alur pelayanan.
6. Membuat kotak pengaduan layanan sebagai evaluasi kerja pemerintah Kecamatan Buahdua.
7. Harus ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pemangkasan atau rasionalisasi pegawai seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akadun. 2012. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Gronroos, C. 2011. *Service Management and Marketing: Managing The Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: Lexington.
- Hasibuan, Malayu, S. P. 2013. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Jusman. 2014. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Agus. 2009. *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan: Dilengkapi Uji Validitas dan Reliabilitas serta Aplikasi Program SPSS*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- STIA Sebelas April Sumedang. 2015. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya: Cetakan II*. Jakarta: CV. Rajawali.
- , 2014. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waridah, Ernawati. 2012. *EYD & Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Widiaswari, Roro Rukmini. 2013. *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. (Tesis) Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Banjarmasin: Program Pascasarjana Universitas Achmad Yani Banjarmasin. [online]. Tersedia: <http://www.google.co.id>. [html](#) [20 Maret 2014].